

Relevansi dan Tantangan Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosiologi

Yunita Anjani^{1)*}, Achmad Hufad²⁾, Yani Achdiani³⁾

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Email coresponden author*: yunitaanjani1@student.upi.edu

Abstrak

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan sosial yang cepat menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi lembaga pendidikan serta mengetahui berbagai tantangan yang dihadapinya dalam masyarakat modern dari perspektif sosiologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur, melalui pengumpulan dan analisis data dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan masih memiliki peran penting sebagai tempat pembentukan pengetahuan, nilai, dan identitas sosial. Namun, pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, khususnya di wilayah 3T, serta perubahan karakter dan identitas peserta didik di era digital. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan memberikan peluang dalam pembelajaran, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kesiapan guru dan infrastruktur. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mampu menyeimbangkan tuntutan perkembangan zaman dengan fungsi sosialnya agar tetap relevan dan mampu menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Keywords: Lembaga Pendidikan, Era Digital, Relevansi Tantangan

PENDAHULUAN

Masyarakat modern bergerak sangat cepat. Perkembangan teknologi digital, arus globalisasi, perubahan pola kerja, hingga transformasi nilai-nilai sosial membentuk realitas baru yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan tidak lagi cukup dipahami sebagai tempat belajar membaca, menulis, atau menguasai materi akademik. Pendidikan menjadi ruang penting tempat individu belajar memahami dirinya, membangun identitas sosial, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, membicarakan relevansi lembaga pendidikan dalam masyarakat modern bukan sekadar soal kurikulum, tetapi tentang bagaimana pendidikan bisa tetap bermakna di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Dalam kajian sosiologi, pendidikan selalu dipandang sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial. Émile Durkheim menekankan bahwa pendidikan berfungsi menanamkan nilai dan norma kolektif agar tercipta integrasi sosial. Sementara itu, Talcott Parsons melihat sekolah sebagai mekanisme seleksi dan sosialisasi yang mempersiapkan individu memasuki sistem sosial yang lebih luas. Di sisi lain, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa pendidikan juga dapat menjadi sarana reproduksi ketimpangan melalui perbedaan modal budaya yang dimiliki setiap kelompok sosial. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak

pernah berdiri di ruang hampa; ia selalu berkaitan dengan struktur sosial, kekuasaan, dan kepentingan tertentu.

Pendidikan abad ke-21 ini harus mampu membekali generasi muda dengan kompetensi berpikir kritis, komunikasi efektif, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat (Jati, Ningsih et al., 2025). Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa kesenjangan akses digital, lemahnya literasi teknologi, dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Proses pendidikan dapat memperkuat stratifikasi sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan keadilan akses (Jati, Ningsih et al., 2025). Oleh karena itu, di tengah masyarakat modern yang semakin kompetitif dan berbasis pengetahuan, lembaga pendidikan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja sering kali membuat orientasi pendidikan bergeser menjadi sangat pragmatis. Di sisi lain, kesenjangan akses terhadap teknologi dan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki peluang yang sama. Situasi inilah yang membuat pembahasan mengenai relevansi lembaga pendidikan menjadi semakin penting.

Pada saat yang sama, kesenjangan akses terhadap teknologi dan kualitas pendidikan memperlihatkan bahwa tidak semua individu memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan. Banyak anak usia sekolah di daerah pelosok harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berisiko hanya untuk bisa belajar (Dewi, Syamsinar et al., 2025) Urgensi pembahasan ini terletak pada kebutuhan untuk melihat kembali posisi pendidikan secara lebih reflektif. Pendidikan diharapkan tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan yang mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang lebih adil dan manusiawi. Jika lembaga pendidikan hanya mengikuti arus modernitas tanpa kritik, maka risiko terjadinya dehumanisasi dan penguatan ketimpangan sosial semakin besar.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relevansi lembaga pendidikan dalam masyarakat modern dengan menggunakan perspektif sosiologi, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang dihadapinya. Selain itu, tulisan ini berupaya menawarkan pemikiran alternatif sebagai upaya memperkuat peran pendidikan agar tetap menjadi ruang pembentukan nilai, kesadaran kritis, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah bahwa keberlanjutan relevansi lembaga pendidikan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan tuntutan modernitas dengan fungsi sosial dan moralnya. Pendidikan yang mampu bertransformasi tanpa kehilangan orientasi nilai akan tetap menjadi institusi strategis dalam membangun masyarakat modern yang inklusif, reflektif, dan berkeadaban.

Dalam konteks tersebut, pendidikan abad ke-21 tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi juga harus mampu menentukan arah perubahan itu sendiri. Artinya, pendidikan tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, tetapi juga perlu menjaga perannya sebagai ruang pembentukan nilai dan kesadaran sosial (Maharani & Khasanah, 2026). Jika tidak, ada risiko bahwa pendidikan justru kehilangan makna dasarnya dan hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata.

Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pendidikan yang cukup signifikan. Di satu sisi, tuntutan dunia kerja mendorong lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, memiliki keterampilan teknis, dan mampu bersaing secara global. Namun di sisi lain, orientasi yang terlalu berfokus pada pasar dapat mengurangi perhatian terhadap pembentukan karakter, nilai kemanusiaan, dan kemampuan berpikir kritis (Jati, Ningsih, & Yahya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berada dalam posisi yang dilematis antara fungsi pengembangan manusia (human development) dan tuntutan sebagai institusi yang berorientasi pasar (market-driven).

Selain itu, perkembangan teknologi digital semakin memperkuat perubahan tersebut. Akses informasi yang semakin terbuka membuat peserta didik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga pendidikan formal. Mereka dapat belajar secara mandiri melalui berbagai sumber di internet. Sekilas kondisi ini terlihat sebagai kemajuan, tetapi jika dilihat lebih dalam, tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan informasi tersebut (Pratama et al., 2025).

Perbedaan kemampuan literasi digital, akses perangkat, serta lingkungan belajar menjadi faktor yang menentukan apakah seseorang dapat benar-benar memperoleh manfaat dari keterbukaan informasi. Dalam hal ini, asumsi bahwa teknologi secara otomatis menciptakan kesetaraan pendidikan menjadi kurang tepat. Justru sebaliknya, tanpa pendampingan yang memadai, keterbukaan informasi dapat memperlebar kesenjangan antarindividu (Westari & Sumarsono, 2025).

Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan tetap tidak tergantikan. Pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi sebagai mediator yang membantu peserta didik memahami, menyaring, dan mengolah informasi secara kritis. Dengan kata lain, pendidikan berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir, bukan sekadar memberikan pengetahuan (Ermayanti et al., 2023).

Di sisi lain, perubahan sosial di era digital juga berdampak pada pembentukan identitas peserta didik. Interaksi yang semakin banyak terjadi di ruang digital membawa pengaruh terhadap cara individu melihat dirinya dan lingkungan sosialnya. Nilai-nilai yang diterima menjadi semakin beragam, bahkan sering kali bertentangan. Jika tidak diimbangi dengan pendampingan yang tepat, kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan bahkan krisis identitas (Zahrotunnisa et al., 2025).

Selain tantangan kultural, pendidikan juga masih dihadapkan pada persoalan struktural yang belum terselesaikan, seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Perbedaan kondisi antar wilayah, terutama di daerah 3T, menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak (Dewi et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan.

Jika dilihat dari perspektif sosiologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya netral. Akses dan kualitas pendidikan sering kali ditentukan oleh posisi sosial seseorang. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada (Fatmawati &

Maftuh, 2026). Ini menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan juga mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan dalam proses pembelajaran, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan akses teknologi, serta persoalan etika (Syahputra et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari dinamika yang harus dikelola secara bijak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan dalam masyarakat modern berada dalam situasi yang kompleks. Pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi sosialnya. Jika pendidikan hanya mengikuti arus perubahan tanpa arah yang jelas, maka risiko kehilangan makna dan fungsi sosialnya akan semakin besar.

Oleh karena itu, penting untuk melihat kembali peran lembaga pendidikan secara lebih kritis, tidak hanya sebagai institusi yang menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga sebagai ruang pembentukan manusia yang memiliki kesadaran sosial, nilai, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai relevansi dan tantangan lembaga pendidikan menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Metode ini dipilih karena pembahasan dalam artikel lebih menekankan pada penelusuran dan pengkajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relevansi dan tantangan lembaga pendidikan dalam masyarakat modern. Studi literatur merupakan metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai data utama yang dianalisis secara sistematis dan kritis (Zahrotunnisa et al., 2025; Maharani & Khasanah, 2026). Ruang lingkup penelitian difokuskan pada lembaga pendidikan formal dan perannya di tengah perubahan sosial modern, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika struktur sosial. Kajian diarahkan pada bagaimana lembaga pendidikan menjalankan fungsinya dan tantangan apa saja yang muncul dalam konteks tersebut.

Sumber data diperoleh dari berbagai referensi tertulis, antara lain buku-buku sosiologi pendidikan, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel akademik yang relevan dan dapat dipercaya. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian studi literatur karena memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber (Westari & Sumarsono, 2025; Pratama et al., 2025). Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik dan kejelasan rujukan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat bagian-bagian penting dari sumber yang telah dipilih. Data yang terkumpul kemudian disusun sesuai dengan fokus pembahasan agar lebih terarah dan sistematis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kajian isi. Data yang telah dikumpulkan dibandingkan dan dipahami secara kritis untuk menemukan keterkaitan antar gagasan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai

relevansi dan tantangan lembaga pendidikan dalam masyarakat modern dari perspektif sosiologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transformasi pendidikan di era digital semakin menegaskan pentingnya lembaga pendidikan formal. Secara bahasa lembaga adalah suatu organisasi. Sedangkan pendidikan adalah usaha manusia dewasa dalam mengembangkan potensi anak yang sedang berkembang untuk menjadi manusia yang berguna (Ermayanti et al., 2023). Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks. Lembaga pendidikan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, serta kebijakan pendidikan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih luas (Ermayanti et al., 2023). Dalam perspektif fungsionalisme, kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan berperan menjaga stabilitas sosial melalui proses sosialisasi nilai dan norma kepada generasi muda.

Adapun penelitian oleh Mushthofa Hidayat Jati dkk. (2025) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk transformasi sosial melalui pengembangan pola pikir, mobilitas sosial, serta perubahan budaya. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Émile Durkheim yang melihat pendidikan sebagai sarana internalisasi nilai kolektif, sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan adanya dualitas fungsi pendidikan, yaitu sebagai alat reproduksi sosial sekaligus agen perubahan sosial.

Dari perspektif teori konflik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Karl Marx dan Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa pendidikan tidak selalu netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Ketimpangan akses pendidikan, terutama dalam konteks digital, berpotensi memperkuat stratifikasi sosial dan menghambat mobilitas sosial kelompok tertentu (Fatmawati & Maftuh, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang adil, pendidikan justru dapat menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan antar generasi.

Lebih lanjut, Perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi yang lebih luas dan cepat, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga melalui ruang digital. Dalam perspektif fungsionalisme, kondisi ini membantu individu beradaptasi dengan perubahan sosial. Namun, keterbukaan informasi tidak serta-merta menciptakan kesetaraan, karena perbedaan literasi digital, akses perangkat, dan pendampingan belajar memengaruhi cara individu memanfaatkannya. Sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu, perbedaan modal budaya turut menentukan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal tetap berperan penting dalam membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis dan menggunakan informasi secara tepat

Laporan UNESCO (2021) dalam *Reimagining Our Futures Together* menekankan bahwa meskipun akses informasi semakin terbuka melalui teknologi, sekolah dan universitas tetap memiliki peran sentral dalam memberikan arah pembelajaran, membangun nalar kritis, serta menjamin legitimasi kompetensi melalui sistem sertifikasi. Dengan demikian, pendidikan formal tidak tergantikan, tetapi bertransformasi mengikuti perubahan sosial. Penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan abad ke-21 juga ditegaskan dalam laporan OECD (2021) melalui kerangka *Education 2030*, yang menyoroti pentingnya literasi digital, kreativitas, kolaborasi, serta tanggung jawab sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan sebagai agen adaptasi terhadap globalisasi dan perkembangan teknologi. Namun, laporan tersebut juga mencatat adanya kesenjangan kesiapan antarnegara dan antarwilayah dalam mengintegrasikan kompetensi digital secara merata.

Transformasi pendidikan di era digital juga memengaruhi pembentukan identitas sosial peserta didik. Perubahan pola interaksi dalam pembelajaran daring tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga membentuk cara individu memaknai peran, prestasi, dan relasi sosialnya. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Zahrotunnisa dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa era digital dapat memicu krisis identitas, terutama akibat pengaruh media sosial dan perubahan nilai budaya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berhadapan dengan tantangan teknis, tetapi juga tantangan kultural dan psikososial.

Dalam konteks mobilitas sosial, laporan World Bank (2020) dalam *The Human Capital Index* menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan berkorelasi dengan peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi. Secara teoretis, pandangan ini sejalan dengan perspektif fungsionalisme yang melihat pendidikan sebagai mekanisme integrasi sosial. Namun, kajian kontemporer yang terinspirasi dari pemikiran Pierre Bourdieu kembali mengingatkan bahwa ketimpangan akses digital dan kualitas sekolah dapat memperkuat stratifikasi sosial apabila tidak diimbangi kebijakan yang inklusif. Dari sudut pandang interaksi simbolik, penelitian pendidikan selama masa pandemi menunjukkan bahwa pengalaman belajar daring memengaruhi pembentukan identitas akademik dan motivasi siswa (UNESCO, 2021). Interaksi guru-siswa yang berubah ke ruang digital memunculkan dinamika baru dalam pembentukan peran dan ekspektasi sosial.

Tantangan lain yang signifikan adalah ketimpangan pendidikan antar wilayah, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penelitian Dewi dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural seperti distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, serta kebijakan yang belum adaptif terhadap kondisi lokal. Selain itu, kebijakan desentralisasi pendidikan juga belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperlebar perbedaan kualitas pendidikan antar daerah (Yusuf & Hanif, 2025)

Sehingga tantangan utama yang teridentifikasi dalam lima tahun terakhir meliputi kesenjangan akses internet, keterbatasan perangkat, serta kebutuhan penguatan etika digital. Laporan UNICEF (2020) menunjukkan bahwa jutaan pelajar mengalami hambatan pembelajaran akibat keterbatasan akses selama pandemi. Temuan ini menguatkan argumen teori konflik bahwa tanpa pemerataan sumber daya, pendidikan dapat mereproduksi

ketimpangan. Oleh karena itu, relevansi lembaga pendidikan dalam masyarakat modern sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi secara adil, menjaga fungsi sosialnya, serta mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten secara digital, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

Selain persoalan akses dan digitalisasi, tantangan yang semakin menguat dalam masyarakat modern adalah profesionalisme tenaga pendidik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penelitian Dewi, Syamsinar, dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, tetapi juga oleh faktor struktural seperti rendahnya kesejahteraan guru, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar teknis, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial dan kebijakan negara.

Jika dianalisis melalui perspektif teori konflik, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sumber daya yang sistematis. Guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan justru berada dalam posisi yang kurang diuntungkan, terutama di wilayah perifer. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi tidak merata, dan peserta didik di daerah 3T berpotensi mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan dapat menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial apabila tidak disertai dengan distribusi sumber daya yang adil.

Di sisi lain, berbagai upaya pemerintah seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta program pemerataan tenaga pendidik telah dilakukan. Namun, Dewi dkk. (2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Artinya, terdapat kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan realitas di lapangan. Dalam konteks ini, pendekatan top-down sering kali tidak cukup efektif karena kurang mempertimbangkan kebutuhan lokal yang beragam.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan menekankan pentingnya kebijakan berbasis kebutuhan lokal dan data spasial, peningkatan insentif dan perlindungan bagi guru, serta pelatihan kontekstual yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi daerah menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di wilayah 3T (Dewi et al., 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan geografis masing-masing wilayah.

Selanjutnya, dalam konteks tata kelola pendidikan, desentralisasi yang diharapkan mampu meningkatkan pemerataan justru menunjukkan hasil yang ambivalen. Penelitian Yusuf dan Hanif (2025) mengungkapkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan karena adanya perbedaan kapasitas antar daerah dalam mengelola pendidikan.

Dari perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata. Daerah dengan sumber daya yang lebih kuat cenderung mampu mengelola pendidikan dengan lebih baik, sementara daerah dengan keterbatasan justru semakin tertinggal. Dengan demikian, desentralisasi tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan harus diiringi dengan penguatan kapasitas daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif (Yusuf & Hanif, 2025).

Selain aspek struktural, tantangan pendidikan modern juga menyentuh dimensi kultural dan psikososial, khususnya terkait pembentukan identitas peserta didik. Penelitian Zahrotunnisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa era digital, terutama melalui media sosial, memengaruhi pembentukan identitas pelajar, termasuk dalam aspek keagamaan. Fenomena ini sejalan dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson yang menekankan pentingnya fase pencarian identitas pada remaja.

Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas dan nilai. Namun, keterbukaan informasi di era digital sering kali menghadirkan nilai-nilai yang beragam, bahkan bertentangan, sehingga berpotensi menimbulkan krisis identitas pada peserta didik. Oleh karena itu, peran pendidik menjadi semakin penting sebagai pembimbing yang mampu membantu siswa menyaring informasi dan membangun identitas yang kuat dan reflektif (Zahrotunnisa et al., 2025).

Lebih lanjut, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi faktor penting dalam transformasi pendidikan modern. Penelitian Syahputra dkk. (2026) menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui sistem adaptif, tutor virtual, serta evaluasi berbasis data. Teknologi ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih personal dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, pemanfaatan AI juga menghadirkan tantangan baru, seperti kesenjangan infrastruktur, rendahnya kompetensi digital guru, serta persoalan etika terkait keamanan data dan ketergantungan terhadap teknologi. Dalam perspektif sosiologi, hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi AI dalam pendidikan sangat bergantung pada kebijakan yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses teknologi (Syahputra et al., 2026).

Di sisi lain, pendidikan juga dihadapkan pada tantangan dalam membentuk karakter dan nilai sosial generasi muda. Penelitian Zulkifli dkk. (2025) menunjukkan bahwa era digital memicu disorientasi nilai, budaya instan, serta krisis karakter akibat lemahnya pendidikan moral dan pengaruh lingkungan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga harus menekankan pada pembentukan karakter dan etika sosial.

Dalam kerangka sosiologi pendidikan, hal ini dapat dipahami sebagai ketegangan antara fungsi instrumental dan fungsi normatif pendidikan. Di satu sisi, pendidikan dituntut untuk menghasilkan individu yang kompeten secara teknis dan siap kerja. Namun di sisi

lain, pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk individu yang memiliki nilai moral, kesadaran sosial, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ketidakseimbangan antara kedua fungsi ini dapat menyebabkan dehumanisasi pendidikan.

Selain itu, fenomena bullying di lingkungan sekolah juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak selalu menjadi ruang yang aman dan inklusif. Penelitian Maharan (2024) menunjukkan bahwa bullying merupakan fenomena yang berkaitan dengan struktur sosial sekolah, terutama hierarki status sosial di antara siswa. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam pendidikan tidak lepas dari relasi kekuasaan dan dominasi, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif interaksi simbolik dan teori konflik.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan sosial peserta didik. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan agen perubahan sosial yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Lebih jauh lagi, pendidikan berbasis masyarakat juga muncul sebagai alternatif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Penelitian Hermawan dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memperluas akses pendidikan bagi kelompok marginal karena bersifat fleksibel dan kontekstual. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan juga memperkuat keberlanjutan program serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal.

Dalam perspektif sosiologi, pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model pendidikan yang bersifat sentralistik menuju model yang lebih partisipatif dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi antara berbagai aktor sosial.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa relevansi lembaga pendidikan dalam masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh kemampuannya merespons berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknologi secara seimbang. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, tetapi juga harus mampu menjaga fungsi sosialnya sebagai pembentuk nilai, identitas, dan keadilan sosial. Tanpa upaya yang komprehensif dan inklusif, pendidikan berisiko kehilangan makna sosialnya dan justru memperkuat ketimpangan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan masih memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat modern, terutama sebagai tempat pembentukan pengetahuan, nilai, dan identitas sosial. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Pendidikan tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak kemudahan dalam akses belajar, tetapi tidak semua kelompok

masyarakat dapat merasakannya secara merata. Kesenjangan akses internet, keterbatasan perangkat, serta perbedaan kemampuan digital menjadi hambatan yang nyata dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif (Pratama et al., 2025; Syahputra et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum tentu secara otomatis menciptakan keadilan dalam pendidikan.

Selain itu, ketimpangan pendidikan di daerah 3T juga menjadi tantangan serius. Faktor seperti kurangnya tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru, serta keterbatasan fasilitas menunjukkan bahwa masalah pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural (Dewi et al., 2025). Kebijakan desentralisasi pendidikan pun belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ini, karena adanya perbedaan kemampuan antar daerah dalam mengelola pendidikan (Yusuf & Hanif, 2025). Di sisi lain, pendidikan juga dihadapkan pada tantangan dalam membentuk karakter dan identitas peserta didik di era digital. Pengaruh media sosial dan perubahan nilai budaya dapat menyebabkan krisis identitas dan melemahnya nilai moral jika tidak diimbangi dengan bimbingan yang tepat (Zahrotunnisa et al., 2025; Zulkifli et al., 2025). Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dan menyaring informasi yang mereka terima.

Secara keseluruhan, relevansi lembaga pendidikan dalam masyarakat modern sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara tuntutan perkembangan zaman dengan fungsi sosialnya. Pendidikan tidak hanya harus menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Jika hal ini dapat dilakukan, maka pendidikan akan tetap menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. A. P., Syamsinar, T., Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). Tantangan profesionalisme guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar): Kajian literatur terhadap ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1053>
- Ermayanti, E., Asti, H. F., Aulia, P., Mahrani, Y., & Efendi, E. (2023). Lembaga pendidikan sebagai suatu sistem sosial. *Jurnal Binagogik*, 10(2). <https://doi.org/10.61290/pgsd.v10i2.581>
- Fatmawati, I., & Maftuh. (2026). Ketimpangan akses pendidikan agama dan implikasinya terhadap mobilitas sosial (Analisis perspektif teori konflik). *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4311>
- Hermawan, R., Wulandari, N. P., Magfiroh, V. S., & Hilman, C. (2025). Peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat. *Journal of Islam Religious Education*, 1(3). <https://doi.org/10.70248/joire.v1i3.2761>
- Jati, M. H., Ningsih, T., & Yahya, S. (2025). Peran Lembaga Pendidikan dalam Membentuk Transformasi Sosial Prespektif Sosiologi Pendidikan. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 8(3), 1308–1324. <https://doi.org/10.24256/pijies.v8i3.8653>

- Maharani, A. G., & Khasanah, N. (2026). Pendidikan dan dinamika sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi pendidikan. *Jurnal Media Akademik*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/yqhb3361>
- Pratama, S., Ashari, M., Zulkarnain, S. A. B., & Sabrina, E. (2025). Pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan: Transformasi pembelajaran di era digital. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1388>
- Syahputra, F., Sabrina, E., Manurung, R., Tarigan, R. R., Tarigan, G. F., Perdana, N. A. P., & Zai, F. P. D. (2026). Peran kecerdasan buatan dalam transformasi pendidikan modern: Tinjauan sistematis literatur 2020–2025. *Journal of Education Science*, 5(1). <https://doi.org/10.58917/aijes.v5i1.547>
- Westari, N., & Sumarsono, R. B. (2025). Tantangan dan peluang transformasi manajemen pendidikan di era digital (Tinjauan literatur sistematis). *Proceedings Series of Educational Studies*. <https://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/10270>
- UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.31004/mnhraz85>
- Zahrotunnisa, Z., Utama, D. S. B., Farhana, Y. W., Aprillia, S. D., & Fadil, A. (2025). Krisis identitas dan tantangan pendidikan Islam di era digital: Analisis perspektif sosiologi pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1126>
- Zulkifli, Z., Suriadi, H., & Sriwahyuni, N. (2025). Problematika karakter generasi muda di era digital: Analisis kritis terhadap tantangan moral dan sosial di era teknologi informasi. *Journal of Social, Education, and Religious Studies*, 1(2). <https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JSERS/article/view/25>